



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LULUT ENDI SUTRISNO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 73723

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/180 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/180 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/79 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/84 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/70 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 850.000.000
6. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 715.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 170.380.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 380.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



4. MOBIL, HONDA CIVIC S5A VTI MT Tahun 2003, HASIL SENDIRI  
Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.525.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	663.680.907
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.915.585.907
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.915.585.907

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.